

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdapat tujuan utama bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai salah satu tujuan utama maka sudah seharusnya kebijakan dan seluruh kegiatan yang telah dirancang oleh pemerintah baik dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat yang memiliki tujuan utama yaitu mensejahterahkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah inti dari suatu pembangunan nasional, tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan kualitas hidup sebuah keluarga, keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi artinya mereka memiliki kualitas hidup yang baik.

Proses pembangunan yang saat ini sedang dijalankan di Indonesia, peningkatan pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi sasaran utama, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi seringkali berkaitan dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dimasyarakat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah sebagai pelaksanaan pembangunan tentunya memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang sangat baik sebagai modal untuk menjalankan proses pembangunan sehingga pembangunan tentunya akan semakin membaik. Peningkatan sumber daya manusia bukan hanya tugas dan tanggung jawab negara indonesia, hal ini pun sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Negara Indonesia memiliki indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*.

Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual. Pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Sebagai suatu proses, pembangunan tentu saja dilakukan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada sekaligus merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan tuntutan-tuntutan pergeseran waktu akibat adanya perkembangan peradaban. Pembangunan berkelanjutan merupakan keinginan pemerintah dan masyarakat diberbagai negara, tidak hanya sesaat. Sumber daya manusia memiliki peran yang penting dari terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat dan dapat menjalankan kehidupan yang lebih produktif.

IPM pertama kali diperkenalkan *United Nations Development Programme (UNDP)* tahun 1990, IPM dibentuk untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah dalam pembangunan manusia. IPM dibentuk dalam oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Metode yang digunakan untuk menghitung IPM memerlukan 4 variabel dari 3 dimensi yaitu, Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) sebagai cerminan dari dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai cermin dimensi Pendidikan, dan pengeluaran perkapita sebagai cermin dari dimensi standar hidup layak (SHL).

Menurut badan pusat statistika (BPS) tahun 2021 pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Bagi Indonesia, IPM digunakan sebagai data

strategis untuk mengukur kinerja pemerintah dalam hal pembangunan manusia. Berikut disajikan tabel data indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
Tahun 2018-2021

No.	Tahun	IPM
1.	2018	71.39
2.	2019	71.92
3.	2020	71.94
4.	2021	72.29

Sumber: Badan Statistika (BPS), 2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Besaran ini dapat menandakan bahwa penduduk Indonesia mulai mengalami peningkatan kesejahteraan, dilihat dari data tersebut masyarakat mulai berhasil dalam mengakses hasil pembangunan pemerintah dibidang Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Ternyata disisi lain kenaikan IPM Indonesia ini masih terdapat provinsi yang memiliki kategori kesejahteraan menengah bawah. Berdasarkan konsep pembangunan manusia menurut persatuan bangsa-bangsa (PBB), Indonesia memiliki satu provinsi yang masih masuk dalam kategori kesejahteraan tinggi dengan besaran IPM lebih dari 80,0, Provinsi tersebut merupakan Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Indonesia saat ini didominasi oleh Provinsi yang memiliki kriteria kesejahteraan pada posisi menengah atas dengan rentang angka IPM antara 66,0 sampai dengan 79,9 dengan jumlah 29 Provinsi, jumlah itu terus meningkat setiap tahunnya diikuti dengan kenaikan angka IPM Nasional setiap tahunnya. Sementara itu masih ada 4 provinsi lainnya yang masuk dalam kategori menengah kebawah IPM antara lain 50,0 hingga 65,9 sudah memasuki status “sedang” (BPS, 2021). Pembangunan manusia di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di tahun 2021 mencapai

72,29, meningkat 0,35 poin (0,49%) dibandingkan dengan capaian sebelumnya yang sebesar 71,94. Kondisi ini berbeda dengan peningkatan IPM pada tahun 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang, hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat menjadi 1,30% pada tahun 2021.

Peningkatan IPM pada tahun 2021 terjadi diseluruh provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh masih ditempati oleh Provinsi Papua(60,62), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta(81,11). Pada tahun ini, DI Yogyakarta mengikuti DKI Jakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang sangat “tinggi”(IPM \geq 80). Sebagai informasi, sejak 2018 tidak ada lagi provinsi dengan status “rendah” setelah status pembangunan manusia di papua meningkat dari “rendah” ke “sedang”. Selama 2010-2021, IPM Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,76%. Berikut ini disajikan tabel data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi di Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia
Tahun 2018-2021

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1.	DKI Jakarta	80.47	80.76	80.77	80.11
2.	DI Yogyakarta	79.53	79.99	79.97	80.22
3.	Kalimantan Timur	75.83	76.61	76.24	76.88
4.	Kepulauan Riau	74.84	75.48	75.59	75.79
5.	Bali	74.77	75.38	75.50	75.69
6.	Riau	72.44	73.00	72.71	72.94
7.	Sulawesi Utara	72.20	72.99	72.93	73.30
8.	Banten	71.95	72.44	72.45	72.72
9.	Sumatera Barat	71.73	72.39	72.38	72.65
10.	Jawa Barat	71.30	72.03	72.09	72.45

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021
11.	Aceh	71.19	71.90	71.99	72.18
12.	Sumatera Utara	71.18	71.74	77.77	72.00
13.	Jawa Tengah	71.12	71.73	71.87	72.16
14.	Sulawesi Selatan	70.90	71.66	71.93	72.24
15.	Jawa Timur	70.77	71.50	71.71	72.14
16.	Kep.Bangka Belitung	70.67	71.30	71.47	71.69
17.	Jambi	70.65	71.26	71.29	71.63
18.	Bengkulu	70.64	71.21	71.40	71.64
19.	Sulawesi Tenggara	70.61	71.20	71.45	71.66
20.	Kalimantan Utara	70.56	71.15	70.63	71.19
21.	Kalimantan Tengah	70.42	70.91	71.05	71.25
22.	Kalimantan Selatan	70.17	70.72	70.91	71.28
23.	Sumatera Selatan	69.39	70.02	70.01	70.24
24.	Lampung	69.02	69.57	69.69	69.90
25.	Sulawesi Tengah	68.88	69.50	69.55	69.79
26.	Maluku	68.87	69.45	69.49	69.71
27.	Maluku Utara	67.76	68.70	68.49	68.76
28.	Gorontalo	67.71	68.49	68.68	69.00
29.	Nusa Tenggara Barat	67.30	68.14	68.25	68.65
30.	Kalimantan Barat	66.98	67.65	67.66	67.90
31.	Sulawesi Barat	65.10	65.73	66.11	66.36
32.	Nusa Tenggara Timur	64.39	65.23	65.19	65.28
33.	Papua Barat	63.74	64.70	65.09	65.26
34.	Papua	60.06	60.84	60.44	60.62

Sumber: Badan Pusat Statistika (2021)

Berdasarkan data 1.2 diketahui bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2021 3 Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan juga Papua, yang awalnya memiliki besaran IPM terendah telah mengalami peningkatan. 3 Provinsi ini mengalami peningkatan besaran IPM setiap tahunnya dan sudah memasuki status “sedang” dari status rendah. IPM nasional yang setiap tahunnya juga terus meningkat.

Menurut Badan Pusat Statistik indeks pembangunan manusia di NTT meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, IPM NTT sebesar 65,19. Angka ini menurun sebesar 0,04 poin

dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2019 yang sebesar 65,23. Sejak tahun 2011, status pembangunan manusia di NTT telah mencapai level “sedang”. IPM NTT pada tahun 2020 tumbuh sebesar 8,22 persen dibandingkan tahun 2011.

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2021

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten /Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2021			
		2018	2019	2020	2021
1.	Sumba barat	62.91	63.56	63.53	63.83
2.	Sumba timur	64.65	65.34	65.52	65.74
3.	Kupang	63.55	64.43	64.32	64.41
4.	Timor tengah selatan	61.58	62.23	62.15	62.16
5.	Timor tengah utara	62.65	63.34	63.53	63.69
6.	Belu	61.86	62.54	62.68	62.77
7.	Alor	60.14	61.03	61.33	61.37
8.	Lembata	63.96	64.91	64.74	64.75
9.	Flores timur	63.55	64.34	64.22	64.22
10.	Sikka	63.89	64.75	65.11	65.41
11.	Ende	66.62	67.20	67.04	67.30
12.	Ngada	67.1	67.76	67.88	67.88
13.	Manggarai	63.32	64.15	64.54	65.01
14.	Rote ndao	61.51	62.22	62.39	62.60
15.	Manggarai barat	62.58	63.50	63.89	64.17
16.	Sumba tengah	60.07	61.01	61.53	61.80
17.	Sumba barat daya	61.89	62.60	62.28	62.29
18.	Nagekeo	65.35	65.88	65.81	65.82
19.	Manggarai timur	59.49	60.47	60.85	61.37
20.	Sabu raijua	55.79	56.66	57.02	57.83
21.	Malaka	59.66	60.34	60.21	60.42
22.	Kota kupang	78.84	79.55	79.71	79.74

Sumber: Badan Pusat Statistika NTT (2021)

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2021, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita hanya sebesar 20,58 juta per tahun. Artinya pendapatan penduduk NTT merupakan yang terendah dari 33 Provinsi lainnya. Pendapatan penduduk NTT tersebut hanya sepertiga

dari pendapatan penduduk Indonesia yang sebesar Rp 62,2 juta per tahun. Provinsi dengan PDDRB per kapita terendah berikutnya adalah NTB, Maluku, Aceh, Sulawesi Barat. Berikut ini disajikan tabel data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita 5 Provinsi tahun 2021 :

Tabel 1.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
Tahun 2021 (dalam juta rupiah)

No	Provinsi	PDRB
1.	Sulawesi Barat	35.04
2.	Aceh	34.68
3.	Maluku	26.07
4.	NTB	26
5.	NTT	20.58

Sumber: Badan Pusat Statistika (2021)

Berdasarkan tabel 1.3 Provinsi NTT, NTB, dan Maluku merupakan provinsi dengan perolehan PDRB per kapita terendah dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan provinsi dengan perolehan PDRB tertinggi pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan perolehan PDRB Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui bahwa perolehan PDRB 5 provinsi yaitu NTT, NTB, Maluku, Aceh, Sulawesi Barat merupakan PDRB dengan angka per kapita sangat kecil dan juga sangat jauh berbeda dengan perolehan angka provinsi yang memiliki angka PDRB per kapita besar seperti Provinsi DKI Jakarta. Hal ini akan terus menjadi fokus pemerintah bukan hanya meningkatkan PDRB diseluruh provinsi di Indonesia namun juga meratakan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Karena dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masih didominasi oleh provinsi-provinsi besar yang ada di Indonesia. Namun masih banyak juga provinsi atau daerah yang mengalami keteringgalan dalam bidang tersebut.

Menurut BPS indeks pembangunan manusia di NTT tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 IPM NTT sebesar

65,19. Angka ini menurun sebesar 0,04 poin jika dibandingkan dengan IPM NTT tahun 2019 yang sebesar 65,23. Sejak tahun 2011 status pembangunan manusia di Provinsi NTT memang sudah masuk dalam kategori “sedang”. IPM NTT pada tahun 2020 sebesar 8,22 persen dibandingkan tahun 2011. Selama periode 2019 sampai 2020, tiga komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan yaitu Umur Harapan Hidup (HLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sementara satu komponen pembentuk IPM mengalami penurunan yaitu pengeluaran perkapita. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat sebesar Rp 7,598 juta, pada tahun 2020 menurun sebesar Rp 171 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Umur harapan hidup di NTT sebesar 67,01 tahun pada 2020. Bayi yang baru lahir memiliki peluang hidup hingga 67,01 tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,16% dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 66,85 tahun.

Tabel 1.5
Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi NTT Tahun 2018-2021

No	Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Sumba Barat	66,58	66,98	67,08	67,12
2.	Sumba Timur	64,45	64,94	65,13	65,16
3.	Kupang	63,86	64,39	64,63	64,91
4.	Timor Tengah Selatan	65,91	66,32	66,42	66,46
5.	Timor Tengah Utara	66,45	66,86	66,96	67,09
6.	Belu	63,81	64,35	64,61	64,89
7.	Alor	60,80	61,29	61,48	61,64
8.	Lembata	66,57	66,97	67,07	67,20
9.	Flores Timur	64,70	65,10	65,20	65,31
10.	Sikka	66,61	67,07	67,24	67,45
11.	Ende	64,75	65,17	65,29	65,43
12.	Ngada	67,59	67,96	68,04	68,12

13.	Manggarai	66,23	66,77	67,03	67,11
14.	Rote Ndao	63,80	64,34	64,60	64,88
15.	Manggarai Barat	66,58	67,12	67,38	67,46
16.	Sumba Tengah	67,96	68,32	68,38	68,42
17.	Sumba Barat Daya	68,02	68,43	68,53	68,57
18.	Nagekeo	66,62	67,03	67,13	67,25
19.	Manggarai Timur	67,62	67,98	68,04	68,07
20.	Sabu Raijua	59,53	60,23	60,64	60,66
21.	Malaka	64,52	64,89	64,97	65,01
22.	Kota Kupang	68,90	69,37	69,55	69,73
23.	Nusa Tenggara Timur	66,38	66,85	67,01	67,15

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2020. Harapan lama sekolah di NTT sebesar 13,18 tahun pada 2020. Angka ini meningkat sebesar 0,03% dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 13,15 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau Diploma 1 (D1). Harapan lama sekolah sudah lebih tinggi dari rata-ratanya secara nasional sebesar 12,98 tahun.

Tabel 1.6
Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi NTT Tahun 2018-2021

No.	Wilayah	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Sumba Barat	12,88	12,89	13,11	13,12
2.	Sumba Timur	12,80	12,81	12,82	12,83
3.	Kupang	13,83	13,84	13,85	13,86
4.	Timor Tengah Selatan	12,55	12,56	12,57	12,58
5.	Timor Tengah Utara	13,29	13,30	13,31	13,32
6.	Belu	12,25	12,26	12,27	12,28
7.	Alor	12,09	12,11	12,23	12,24
8.	Lembata	12,26	12,40	12,42	12,43
9.	Flores Timur	12,89	12,90	12,91	12,92
10.	Sikka	12,70	12,87	13,16	13,43
11.	Ende	13,76	13,77	13,78	13,79
12.	Ngada	12,68	12,69	12,70	12,71

13.	Manggarai	12,71	13,14	13,41	13,69
14.	Rote Ndao	13,16	13,17	13,18	13,19
15.	Manggarai Barat	11,55	11,96	12,28	12,29
16.	Sumba Tengah	12,32	12,66	12,96	13,04
17.	Sumba Barat Daya	13,04	13,05	13,06	13,07
18.	Nagekeo	12,46	12,47	12,48	12,49
19.	Manggarai Timur	11,34	11,69	11,99	12,26
20.	Sabu Raijua	13,12	13,13	13,14	13,15
21.	Malaka	12,76	12,77	12,78	12,79
22.	Kota Kupang	16,08	16,24	16,40	16,41
23.	Nusa Tenggara Timur	13,10	13,15	13,18	13,20

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Pengeluaran per kapita masyarakat NTT merupakan yang terendah nasional. Berdasarkan BPS rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat NTT hanya sebesar Rp 840.359 per bulan pada tahun 2020. Nilai tersebut hanya sekitar 66% dari rata-rata pengeluaran per kapita nasional yang sebesar Rp 1.264.590 per bulan. Secara rinci, pengeluaran per kapita NTT untuk makan sebesar Rp. 468.252 per bulan dan pengeluaran bukan makan sebesar Rp. 372.106 per bulan. Menurut wilayah tempat tinggal, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat NTT di wilayah perkotaan mencapai Rp. 1.263.545 per bulan, sedangkan untuk masyarakat di pedesaan hanya Rp. 700.794

Tabel 1.7
Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/kota Provinsi NTT
(Ribuan Rupiah)
Tahun 2018-2021

No.	Wilayah	Metode Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Sumba barat	7.275,00	7.586,00	7.321,00	7.307,00
2.	Sumba timur	9.351,00	9.640,00	9.406,00	9.354,00
3.	Kupang	7.472,00	7.698,00	7.526,00	7.476,00
4.	Timor tengah selatan	6.855,00	6.955,00	6.861,00	6.839,00
5.	Timor tengah utara	6.357,00	6.479,00	6.364,00	6.324,00
6.	Belu	7.403,00	7.677,00	7.479,00	7.431,00

No.	Wilayah	Metode Pengeluaran Rill Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)			
		2018	2019	2020	2021
7.	Alor	6.750,00	6.958,00	6.786,00	6.751,00
8.	Lembata	7.253,00	7.474,00	7.305,00	7.257,00
9.	Flores timur	7.573,00	7.770,00	7.631,00	7.578,00
10.	Sikka	7.958,00	8.312,00	8.081,00	8.021,00
11.	Ende	8.995,00	9.315,00	9.094,00	9.027,00
12.	Ngada	8.857,00	8.961,00	8.865,00	8.819,00
13.	Manggarai	7.175,00	7.276,00	7.203,00	7.133,00
14.	Rote ndao	6.484,00	6.720,00	6.539,00	6.503,00
15.	Manggarai barat	7.426,00	7.602,00	7.468,00	7.410,00
16.	Sumba tengah	6.093,00	6.198,00	6.108,00	6.061,00
17.	Sumba barat daya	6.298,00	6.594,00	6.372,00	6.355,00
18.	Nagekeo	8.219,00	8.469,00	8.309,00	8.254,00
19.	Manggarai timur	5.809,00	5.919,00	5.818,00	5.780,00
20.	Sabu raijua	5.245,00	5.354,00	5.265,00	5.256,00
21.	Malaka	5.894,00	5.998,00	5.901,00	5.861,00
22.	Kota kupang	13.199,00	13.592,00	13.337,00	13.218,00
23.	Nusa Tenggara Timur	7.566,00	7.769,00	7.598,00	7.554,00

Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS) Provinsi NTT

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, meningkatnya IPM Provinsi NTT setiap tahunnya dapat diartikan bahwa masyarakat NTT mulai mengalami peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Walaupun IPM Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu naik setiap tahunnya tapi besaran tersebut belum mencapai rata indeks pembangunan nasional yaitu 72.29 pada tahun 2021. Berdasarkan Badan Pusat Statistik(BPS), periode tahun 2018 hingga tahun 2021 besaran IPM mengalami peningkatan, kota kupang merupakan kota yang memiliki angka IPM tertinggi dibandingkan dengan seluruh kabupaten atau kota yang ada pada Provinsi NTT.

Kota Kupang merupakan ibu kota dari Provinsi NTT sehingga akses kepada pemerintah provinsi lebih dekat. Sementara berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa perbedaan antar kabupaten atau kota di Provinsi NTT sangat tinggi. Sehingga, pemerintah

daerah dan pemerintah provinsi perlu menentukan kebijakan sehingga kesejahteraan ini dapat dirasakan secara merata di seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi NTT.

Berdasarkan Uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2021”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah merupakan Langkah yang sangat penting, karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian akan diarahkan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis mencoba menarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018-2021?
2. Apakah pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018-2021?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran per kapita bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018-2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran per kapita bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat ataupun kegunaan bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan manfaat maupun masukan-masuka yang berharga bagi pemerintah daerah Provinsi NTT agar lebih memperhatikan indeks pembangunan manusia di Provinsi NTT.

2. Bagi pihak lain

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak lain sehingga dapat mengetahui seberapa besar pengaruh perekonomian dan pengeluaran per kapita dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi NTT.

3. Bagi penelitian

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh perekonomian dan pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia. Dari penelitian ini juga diharapkan peneliti mampu mendapatkan wawasan, keilmuan, pengetahuan mengenai tingkat kesejahteraan atau IPM di Provinsi NTT.